

Strategi Menjaga Konstituen: Studi Kasus Anggota DPR RI 2014-2019 Daerah Pemilihan Jawa Tengah I

Angga Arrasyid Dian Purnama

Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Received: 7 Juni 2019

Revised: 22 Juni 2019

Accepted: 23 Oktober 2019

Abstract:

This research is about the strategy used by the member legislature body 2014-2019 to keep the constituents' vote in their election area after being elected as a legislative member. This research used a case study in the 1st election area of Central Java Province which includes Semarang City, Semarang District, Kendal District, and Salatiga City. By taking a member of DPR RI as the main sample and two members of DPR RI as a comparative sample or as group control. This research applies the qualitative approach supported by a quantitative approach with the survey method. This research finds the strategy which is used by the member of DPR RI to keep the constituent vote in their election area. It could be done through some strategies such as interactive dialogue, provision of assistance, installation of campaign attributes (banner/billboard/etc), utilization of party structure and base mass party, encouragement of another cadre from the party, community approach, social media and formation of the volunteer. All strategies have objectives to keep the constituent vote in an election area, and to gain the sympathy and vote from those who have not chosen them in the last legislative election. So it could be ended in re-elected the member of DPR RI in the next legislative election.

Keywords:

DPR RI; election area; keeping the constituent; legislative election; political strategy

Pendahuluan

Indonesia dewasa ini dengan terang menyebutkan menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang tertuang dalam Pancasila Sila ke-4 (Demokrasi Musyawarah) maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara kita juga menganut pembagian kekuasaan menjadi tiga atau biasa dikenal dengan trias politica. Konsep ini awalnya digagas oleh John Locke, seorang pemikir dan filsuf dari Inggris yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yakni dua berada di tangan raja atau ratu dan

Korespodensi:

Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Pleburan, Semarang Selatan, Semarang City, Central Java 50241
Email: angga.arrasyid19@gmail.com.

berada di tangan bangsawan (Maksum, 2008: 132). Akhirnya konsep pembagian kekuasaan ini disempurnakan oleh Montesquieu, seorang pemikir dari Perancis yang menyebutkan pemisahan kekuasaan tersebut dibagi menjadi eksekutif (pelaksana pemerintah), legislatif (pengawas jalannya pemerintahan dan pembuat undang-undang), dan yudikatif (penegak hukum) (Noer, 1997: 135). Konsep trias politica yang terakhir yang dianut oleh banyak negara, salah satunya Indonesia.

Dalam trias politica, keberadaan legislatif cukup penting. Mereka menempati posisi sebagai wakil rakyat (Rohaniah, 2015). Menariknya adalah untuk menjadi wakil rakyat mereka harus berkontestasi dan memenangkan pemilihan. Meneliti bagaimana legislatif memenangkan pemilihan menjadi topik menarik. Banyak peneliti yang fokus meneliti dan menulis tentang pemilihan. Sebagai contoh adalah Prasetya, Noak, & Erviantono (2016) yang sekedar fokus pada kemenangan pemilu.

Padahal, terdapat hal yang tidak kalah menarik untuk dikupas. Jika penelitian tentang strategi kemenangan pemilu sudah cukup banyak, maka studi tentang bagaimana para inkumben mempertahankan posisinya belum cukup banyak. Alih-alih menulis tentang strategi kemenangan, artikel ini menulis tentang strategi para anggota legislatif inkumben mempertahankan kursinya di lembaga legislatif.

Terdapat begitu banyak sarana menjaga konstituen pasca terpilih bagi anggota dewan, baik melalui pemberitaan atau iklan di media, dialog tatap muka, pemberian bantuan ke masyarakat dan lain sebagainya. Tentu saja penulis tidak mungkin meneliti ihwal permasalahan tersebut secara menyeluruh ke masing-masing anggota DPR RI. Penulis mengambil beberapa sampel anggota DPR RI yang dirasa memiliki basis massa besar sehingga dibuktikan dengan banyaknya suara yang diperoleh pada saat pemilu legislatif 2014. Juliari P Batubara dirasa dapat mewakili dan menjadi sampel yang pas untuk meneliti cara apa saja yang digunakan anggota DPR RI dalam menciptakan loyalitas memilih konstituen, karena dirinya merupakan pemilik suara perseorangan terbesar di Daerah Pemilihan Jawa Tengah I pada pileg 2014 dengan 128.956 suara.

Di samping itu, agar terjadi perimbangan data saat melakukan penelitian. Peneliti juga akan mengambil beberapa sampel anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I yang akan digunakan sebagai control group dari Juliari P Batubara. Pertama, Yayuk Basuki sebagai salah satu alasan peneliti menjadikan Juliari P Batubara sebagai sampel adalah karena suara terbanyak. Maka Yayuk Basuki dianggap sebagai control group yang tepat, karena memperoleh suara paling sedikit caleg yang berhasil lolos ke Senayan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, yakni dengan 25.615 suara. Kedua, Agus Hermanto juga dirasa menjadi sampel control group yang tepat, karena perolehan suaranya yang medium dengan 32.047 suara dan posisinya saat ini yang menjadi pimpinan DPR RI.

Maka dalam penelitian karya tulis ilmiah kali ini hal tersebut akan dibahas secara komprehensif, yang tercakup dalam pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimanakah anggota DPR RI periode 2014-2019 menjaga suara konstituen di daerah pemilihan pasca terpilih, bagaimana masyarakat pemilih memandang cara yang

dilakukan anggota DPR RI dalam menjaga suara konstituen dan cara apakah yang paling efektif dalam menjaga suara konstituen anggota DPR RI periode 2014-2019 di daerah pemilihan pasca terpilih?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara anggota DPR RI dalam menciptakan loyalitas konstituen pasca terpilih. Selain itu, tulisan ini bermaksud untuk membedah dan menjelaskan seberapa signifikan cara-cara yang dilakukan anggota DPR RI dalam menciptakan loyalitas memilih konstituen, yang dapat dipergunakan dalam pemilu legislatif selanjutnya dalam pemerintahan (Sulardi, 2012).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan kuantitatif dengan metode survei, serta menggunakan desain penelitian deskriptif eksplanatif agar dapat memaparkan secara jelas hasil dari penelitian (Moleong, 2002; Riduwan, 2005; Sekaran, 2006; Sugiyono, 2009; Sutopo, 2006). Penggunaan metode penelitian campuran atau mix method dalam penelitian kali ini dianggap sesuai dengan tema dan judul yang diambil, karena dapat menunjang peneliti mendapatkan hasil yang maksimal.

Perlu dikemukakan pula tempat di mana gejala-gejala tersebut akan diteliti. Maka sesuai dengan judul penelitian “Menjaga Konstituen Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Pasca Terpilih”, penelitian ini akan dilakukan di Daerah Pemilihan I Jawa Tengah yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga.

Penelitian kali ini, sesuai dengan tema dan judul, maka subjek utama untuk dilakukan wawancara ialah Juliari P Batubara dan beberapa narasumber yang terkait control group yakni Yayuk Basuki dan Agus Hermanto. Sedangkan subjek-subjek lainnya ialah Tim Suksesnya ketika menghadapi Pemilihan Legislatif tahun 2014, pengurus partai masing-masing di Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses maupun kunjungan kerja pribadi dan juga beberapa pihak yang dianggap dapat mendukung isi dan hasil penelitian kali ini.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait tentang bagaimana cara anggota DPR RI membentuk elektabilitas di pemilu selanjutnya. Kuesioner tersebut disebar di ke empat wilayah yang menjadi objek penelitian, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Dimana jumlah responden sebanyak 100 orang untuk pemilih Juliari P Batubara, 20 orang untuk pemilih Yayuk Basuki, dan 25 orang untuk pemilih Agus Hermanto. Yang telah ditentukan dengan menggunakan rumus penghitungan sampel.

Elektabilitas merupakan sesuatu yang penting dalam proses pemilihan umum. Elektabilitas bukan hanya sekedar bagaimana calon atau kandidat dalam pemilu dikenal oleh pemilih. Elektabilitas berbeda dengan popularitas. Seorang calon yang populer belum tentu memiliki elektabilitas yang baik. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan apa saja yang digunakan.

Maksud dari keterpilihan adalah tingkat daya tarik seorang calon untuk dipilih. Saat seseorang menjadi calon dalam suatu pemilihan, hal pertama yang umumnya diukur adalah tingkat keterpilihannya. Menjadi umum dilakukan oleh lembaga-lembaga survei dan dipaparkan hasilnya untuk menjadi bahan diskusi di media dan masyarakat. Pengukuran tingkat keterpilihan seorang calon juga menjadi bekal untuk penyusunan strategi kampanye pemenangan pemilihan. Dalam dunia demokrasi keterpilihan bergantung pada pemilih (masyarakat), di satu sisi perilaku suatu tokoh bisa membentuk atau mengubah perilaku memilih dan mensejahterakan masyarakat, sedangkan disisi lain pemilih mungkin menuntut kesejahteraan. Dengan kata lain, tokoh atau calon dengan pemilihnya terpadu dalam kesepakatan (ikrar) bersama jangka panjang tersebut di atas. Hal – hal tersebut yang mengarahkan seberapa besar seseorang itu dipilih dibandingkan dengan tokoh yang lain. Bisa dibuktikan melalui penelitian survei dimana apabila prosentase dipilih semakin besar dibandingkan dengan tokoh lain maka elektabilitas atau keterpilihan dianggap tinggi dan kemungkinan memenangkan pemilu semakin terbuka lebar.

Dari sudut konsep, pemilu sesungguhnya berada di dalam ruang kontes (contest), dengan keterpilihan, terpilih atau tidak terpilih. Maka dari itu untuk mematangkan sebuah strategi kemenangan yang tentunya menjadi tujuan partai politik maupun calon. Elektabilitas menjadi sesuatu yang wajib dimiliki sebagai batu pijakan dalam mennghadapi persaingan dalam Pemilu.

Terkait dengan mengapa calon atau kandidat dipilih dalam pemilu, ada dua pendapat yang muncul berdasarkan dari hasil – hasil survei yang telah dilakukan. Pertama, menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada tahun awal tahun 2009, ditemukan bahwa secara umum lebih banyak responden yang memilih lebih karena faktor partai politik daripada memilih karena faktor calon atau kandidat.¹

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah keterpilihan calon tergantung pada di partai politik mana ia berada atau bernaung pada saat itu. Sebabnya adalah karena semua calon berada di bawah bendera partai politik. Bila citra partai politik baik, maka siapapun yang dicalonkan cenderung akan diuntungkan. Sebaliknya, jika kualitas calon baik namaun berada di bawah partai politik yang citranya kurang baik maka ia cenderung dikelompokkan pada kelompok politik yang kurang baik juga sehingga tidak dipilih. Ini mengindikasikan calon belum mampu menaikkan perolehan suara partai politik.

Responden pada saat itu juga melihat bahwa partai politik mampu membantu menyederhanakan jumlah calon yang jumlahnya sangat banyak. Terkait dengan jumlah partai peserta pemilu pada tahun 2009 yang sebanyak 44 partai politik. Responden dalam menyederhanakan pilihannya, maka mereka lebih memilih partai politik dari pada memilih calon secara langsung. Apalagi dengan keterbatasan informasi yang mereka dapatkan tentang masing-masing calon, serta kualitas tiap responden yang secara umum masih terbatas untuk mengetahui kompleksitas dari calon.

Pendapat yang kedua merupakan hasil penelitian/survei lain yang pernah dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada pertengahan tahun 2013. Hasilnya telah ditemukan bahwa figur calon pada Dapil tertentu dapat mempengaruhi hasil suara yang diperoleh partai politik.² Partai politik tersebut adalah partai Demokrat di Banten III suara naik dari 12% menjadi 20%; PKS di Sulsel I suara naik dari 4% menjadi 5%; Golkar di Jabar VII suara naik dari 21% menjadi 22%; PDI Perjuangan di Jateng V suara naik dari 46% menjadi 48%. Fenomena tersebut dengan catatan bahwa dilakukan simulasi menggunakan kertas suara tanpa informasi calon dan kertas suara dengan informasi calon. Hal tersebut membuktikan bahwa figur calon memiliki peran dalam menentukan suara yang diperoleh partai politik. Meskipun secara umum, faktor kepartaian masih mendominasi perolehan suara partai. Figur calon disini dapat diartikan sebagai rekam jejak kemampuan maupun karakter dari calon tersebut.

Kedua hasil survei yang telah dilakukan pada tahun 2009 dan tahun 2013 dapat kita tarik bahwa telah terjadi perubahan cara pandang pemilih terhadap pemilu legislatif. Ketika pemilih yang notabnya semakin cerdas, diberikan pemahaman lebih tentang siapa saja calon anggota legislatif yang menjadi peserta pemilu, maka kecenderungan pemilih lebih memilih figur calon. Tentu saja hal ini merupakan fenomena baru bagi pelaksanaan pemilu legislatif dimana pemilih memandang bahwa memilih anggota legislatif dalam pemilu memerlukan kejelian lebih untuk memahami siapa figur yang dipilih.

Elektabilitas Pasca Pemilu: Sebuah Kerangka Teoritis

Elektabilitas nampaknya merupakan hasil akhir dari berbagai proses politik yang dilakukan oleh para politisi. Kontestasi politik apapun yang sedang dihadapi, mulai dari Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bahkan Pemilihan Presiden (Pilpres), elektabilitas yang tinggi menjadi sebuah tujuan dari berbagai strategi yang dijalankan oleh para kontestan pemilu beserta para tim suksesnya (Surbakti, 1999)

Merebut tentu berbeda dengan mempertahankan. Begitu pula dengan elektabilitas yang dimiliki oleh para anggota legislatif. Menciptakan elektabilitas ketika baru mencalonkan diri sebagai caleg, tentu sedikit berbeda dengan menjaga elektabilitas ketika sudah terpilih.

Sebuah pemahaman yang harus disadari oleh semua kalangan, baik para intelektual di bidang politik, politisi, dan masyarakat umum. Sejatinya proses politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan tidak hanya terestriktif hanya pada saat pemilu saja. Apabila ihwal tersebut yang terjadi, anggapan bahwa anggota DPR RI hanya menampakkan batang hidungnya ketika menjelang pemilu saja akan terus lestari, dan rasa tanggung jawab yang dimiliki para legislator terhadap konstituennya menjadi sangat minim.

Proses politik tersebut harus dipahami bersama merupakan proses yang bersifat kontinu (Suwardi, Harsono, & Dkk, 2002). Para politisi yang terpilih menjadi pejabat

publik, pasti memiliki janji-janji politik kepada para pemilihnya yang harus diwujudkan selama dia menjabat.

Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki, sebenarnya bukan menjadi sebuah kesulitan bagi para anggota DPR RI untuk menjaga suara konstituennya, bahkan menambah apabila dimungkinkan. Masa reses dan kunjungan kerja pribadi contoh dari fasilitas tersebut. Dengan waktu yang telah disediakan dan anggaran yang disediakan oleh negara, menjadi tidak ada alasan bagi para anggota DPR RI untuk tidak sering mengunjungi para konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

Namun, ini bukanlah persoalan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau. Sehingga itu semua kembali lagi kepada anggota DPR RI yang bersangkutan. Padahal, politik secara keseluruhan adalah relasi antara permintaan dan penawaran (Mudde, 2000). Terdapat dua faktor yang mempengaruhi peningkatan elektabilitas, yakni faktor permintaan dan faktor penawaran. Masyarakat menurut Mudde memiliki permintaannya tersendiri, baik bantuan sosial, lapangan pekerjaan atau lain sebagainya. Partai politik atau politisi harus bisa memberi sebuah penawaran yang mengakomodir permintaan masyarakat tersebut.

Apabila teori tersebut dikorelasikan dengan penelitian kali ini, maka menjaga elektabilitas oleh para anggota DPR RI menjadi sebuah keniscayaan. Rajin mengunjungi daerah pemilihan ketika masa reses dan kunjungan kerja pribadi, pasti memenuhi keinginan sebagian masyarakat yang ingin bertemu dengan wakil rakyatnya. Terlebih lagi apabila pada saat pertemuan tersebut, sang anggota dewan memberikan bantuan kepada para konstituennya. Tentunya masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh para legislator, dalam menjaga suara konstituen, dengan mengakomodir segala harapan dan keinginan dari masyarakat dalam lingkup demokrasi (Lijphart, 1984).

Jaringan

Konsep jaringan (*network*) merupakan dasar terbentuknya hubungan timbal balik. Setiap individu maupun kelompok dapat memiliki jaringannya sendiri yang mana dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kepentingannya. Jaringan juga dapat di maksud sebagai sebuah cara untuk melakukan koordinasi dengan pemahaman bahwa hubungan yang timbul berdasarkan pada interaksi yang setara.

Sebuah jaringan adalah sekumpulan aktor yang dihubungkan oleh organisasi, konsep, dan sebagainya. Ikatan – ikatan ini menghubungkan berbagai aktor dan bisa bersifat terarah atau tidak terarah, bisa juga bersifat dikotomis atau terukur. Setiap ikatan tipe tertentu membangun sebuah relasi sosial yang bersifat biner dan setiap jaringan membentuk sebuah jaringan yang unik (Borgatti & Foster., 2003).

Menurut pandangan pakar teori jaringan, pendekatan normatif memusatkan perhatian terhadap kultur dan proses sosialisai yang menanamkan (*internalization*) norma dan nilai kedalam diri aktor. Menurut pendekatan normatif, yang mempersatukan orang secara bersama dalam sekumpulan gagasan bersama. Pakar teori jaringan menolak

pandangan demikian dan menyatakan bahwa orang harus memusatkan perhatian pada pola ikatan objektif yang menghubungkan anggota masyarakat.

William mengungkapkan pandangan ini, “Analisis jaringan lebih ingin mempelajari keteraturan individu dan kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Karena itu pakar analisis jaringan mencoba menghindari penjelasan normatif dan perilaku sosial. Mereka menolak setiap penjelasan nonstruktural yang memperlakukan proses sosial sama dengan penjumlahan ciri pribadi aktor individual dan norma yang tertanam.”

Karakteristik dari sebuah jaringan adalah sebagai berikut. Pertama, diciptakan untuk bermacam – macam fungsi dan terdiri dari berbagai struktur. Bergantung pada apa yang dirasa sebagai jalan yang optimal untuk mencapai tujuan yang pasti. Struktur jaringan bentuknya bervariasi. Kedua, asosiasi formal dan informal. Jaringan informal sering muncul dalam merespon situasi khusus, sedangkan jaringan formal terbentuk dengan kualifikasi yang tegas dalam keanggotaan dan memiliki manajemen artikulasi dan struktur komunikasi yang jelas. Ketiga, lebih dari sekedar pusat sumber daya bagi para anggota. Ada banyak variasi dalam bentuk kontribusi keuntungan yang diharapkan para anggota. Meskipun pertukaran pengetahuan dan teknologi merupakan aktivitas yang penting dari sebagian besar jaringan, inti dari adanya jaringan adalah hubungan antar anggotanya.

Perbedaan pemahaman teoritis tentang jaringan, tentu tidak mengaburkan esensi dari arti jaringan itu sendiri. Dimana setiap individu atau masyarakat memiliki keterkaitan satu sama lain. Borgatti dan Foster mengatakan bahwa jaringan terbentuk karena keterkaitan kultur, konsep, agama dan ikatan primordial lainnya. Sedangkan William mengungkapkan bahwa jaringan setiap individu terbentuk, dikarenakan perilaku masing-masing individu tersebut.

Masing-masing dapat kita nilai memiliki kebenaran, karena bagaimanapun jaringan pasti diperlukan oleh setiap individu, baik untuk berinteraksi, bersosialisasi, maupun mengaktualisasi diri (Asfar, 2006). Terlebih di bidang politik, dengan adanya jaringan yang dibangun, menjadikan aspirasi dan kepentingan dapat tersampaikan. Apabila dikaitkan dengan pemilu, calon atau kandidat dapat memanfaatkan jaringan yang dimilikinya untuk membantu memenangkan suara rakyat. Jaringan akan mendekatkan pihak satu dengan pihak yang lain, sehingga loyalitas pemilih kepada calon akan tercipta.

Strategi Politik

Schroder (2009) menjabarkan mengenai sepuluh langkah sistematis dalam merencanakan strategi politik. Sepuluh langkah tersebut Schroder anggap perlu, agar strategi yang didapat merupakan strategi yang benar-benar efektif dan efisien, dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Langkah-langkah tersebut ialah merumuskan misi terkait hal apa saja yang perlu direncanakan dalam strategi, penilaian situasional dan

evaluasi, perumusan sub-strategi, perumusan sasaran, target image, kelompok-kelompok target dan pesan kelompok target.

Pemilihan instrumen kunci, terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu, ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu. Karena setiap kelompok target, hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu.

Pemilihan instrumen-instrumen kunci yang akan digunakan, sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan sumber daya, untuk mengimplementasikan strategi serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi.

Dalam pengimplementasian strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan (Baali, Fuad, & Wardi, 1989). Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi signifikan untuk tiga aspek, yaitu pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh, dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan.

Hubungan antara ketiga pihak ini, diperhatikan kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi, dan etika, yang merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara dalam bidang operasional, syarat awal untuk keberhasilannya tergantung kepada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.

Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah prinsip pengumpulan data intelejen dan perolehan informasi. Elemen yang kedua ialah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri.

Setelah itu, barulah dianalisis menggunakan analisis SWOT, yakni Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang berarti Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Analisis SWOT membatasi diri kepada penilaian situasi dan perumusan strategi, yang bergerak lebih jauh pada evaluasi strategi, terutama saat pelaksanaannya (Schroder, 2009).

Langkah Strategis yang utama, selain mengukur diri dengan analisis SWOT, ialah dengan mengumpulkan informasi secara objektif. Hal ini diperlukan, terutama untuk mengidentifikasi para pesaing, dan bisa didapat dari informasi kubu pesaing. Melalui spionase, analisis survei, analisis media dan penjelasan dari aliansi pesaing. Selain itu, juga perlu secara jelas mengetahui aturan main yang tertuang dalam produk perundang-undangan yang berlaku (Alfian, 2008).

Menjaga Konstituen Pemilu

Setelah melakukan berbagai tahapan perencanaan strategi mulai dari pembentukan visi dan misi hingga analisis SWOT, Tim Tenaga Ahli Juliari P Batubara kemudian membentuk strategi-strategi politik yang berlandaskan berbagai analisis yang

telah dilakukan, baik analisis internal maupun analisis eksternal. Strategi yang dibentuk dan siap diimplementasikan guna menjaga suara konstituen dan menghadapi Pileg tahun 2019 antara lain:

Dialog Tatap Muka

Tak kenal maka tak sayang, sebuah adagium lama yang dirasa sesuai dengan segala keadaan di kehidupan kita. Begitu pula dalam kehidupan politik, khususnya kontestasi politik. Kedekatan emosional antara anggota DPR RI dengan masyarakat yang bertatap muka dan berdialog secara langsung tentu akan berbeda jauh dengan yang hanya mengenali melalui media-media kampanye seperti baliho, spanduk dan lainnya.

Seperti teori yang dikemukakan oleh Ruki, bahwa terdapat tiga hal yang harus dikuasai oleh seseorang untuk menunjang kinerjanya. Terlebih dalam hal ini ialah anggota DPR RI, ketiga hal tersebut ialah:

1. Keahlian teknis;
2. Keahlian interaksi;
3. Keahlian konseptual.

Intensitas kunjungan ke daerah pemilihan dan melakukan dialog tatap muka dengan masyarakat, ialah salah satu bentuk keahlian interaksi yang harus dimiliki oleh seorang anggota DPR RI. Karena itu berkaitan langsung, mengenai aspirasi yang akan ia bawa ketika bertugas di parlemen. Selain itu, dialog tatap muka merupakan strategi paling ampuh dalam menciptakan simpati masyarakat, dalam rangka menjaga suara konstituen di daerah pemilihan. Hal tersebut diiyakan oleh para praktisi politik yang ditemui oleh peneliti, dan juga diaminikan oleh masyarakat pemilih yang tercermin dalam hasil survei berikut:

Gambar 13: Tabel Hasil Survei Mengenai Keefektifan Dialog Tatap Muka

Strategi Menjaga Suara Konstituen	Konstituen Juliari P Batubara	Konstituen Agus Hermanto	Konstituen Yayuk Basuki
Dialog Tatap Muka	52,7%	20%	15%

Sumber: Hasil survei olahan peneliti

Pemberian Bantuan

Sebagai seorang legislatif, walaupun tidak seperti eksekutif yang bisa memberi bantuan secara langsung kepada masyarakat melalui program kerjanya. Anggota DPR RI tetap dapat menyalurkan bantuan kepada para konstituennya, baik menggunakan dana kunjungan ke daerah pemilihan, dana pribadi, maupun melalui advokasi ke mitra kerja komisi masing-masing. Sebagai contoh Juliari saat ini berada di Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM. Setiap kementerian tersebut memiliki

program kerja yang dapat diakses oleh anggota DPR RI, kaitannya mengadvokasi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.

Karena tidak dapat kita pungkiri, pasti terdapat keinginan dari masyarakat ketika bertemu dengan wakil rakyatnya. Selain untuk menyampaikan aspirasi, juga ingin diberi bantuan. Seperti terlihat dalam hasil survei berikut ini:

Gambar 14: Tabel Hasil Survei Keinginan Masyarakat Ketika Bertemu Anggota DPR RI

Keinginan Masy Ketika Bertemu Anggota Dpr Ri	Konstituen Juliari P Batubara	Konstituen Agus Hermanto	Konstituen Yayuk Basuki
Menyampaikan Aspirasi	83,3%	75%	80%
Mendapatkan Bantuan	16,7%	12,5%	20%

Sumber: Hasil survei olahan peneliti

Atribut Kampanye (Spanduk/Baliho/DII)

Daerah pemilihan yang begitu luas, berkisar antara tiga hingga 6 kabupaten/kota, membuat jangkauan seorang anggota DPR RI menjadi terbatas ketika ingin berdialog tatap muka dengan para konstituennya. Walaupun sebenarnya hal tersebut merupakan cara paling efektif dalam menjaga suara konstituen. Keadaan ini menjadi sebuah kewajaran, mengingat terbatasnya waktu dan sumber daya yang dimiliki. Sehingga penggunaan atribut kampanye, berupa pemasangan spanduk dan baliho di daerah pemilihan menjadi sebuah keniscayaan.

Walaupun tidak secara signifikan menaikkan elektabilitas politisi yang bersangkutan, namun atribut kampanye sudah diakui menjadi cara yang ampuh dalam menaikkan tingkat keterkenalan (popularitas) publik terhadap politisi yang bersangkutan. Di tambah lagi berdasarkan hasil survei, pemasangan spanduk/baliho/alat peraga kampanye lainnya. Menempati peringkat ke dua hasil pendapat masyarakat dalam menjaga suara konstituen, di bawah dialog tatap muka, dari survei yang dilakukan oleh peneliti.

Gambar 15: Tabel Hasil Survei Mengenai Keefektifan Atribut Kampanye

Strategi Menjaga Suara Konstituen	Konstituen Juliari P Batubara	Konstituen Agus Hermanto	Konstituen Yayuk Basuki
Pemasangan Atribut Kampanye	29,1%	12%	10%

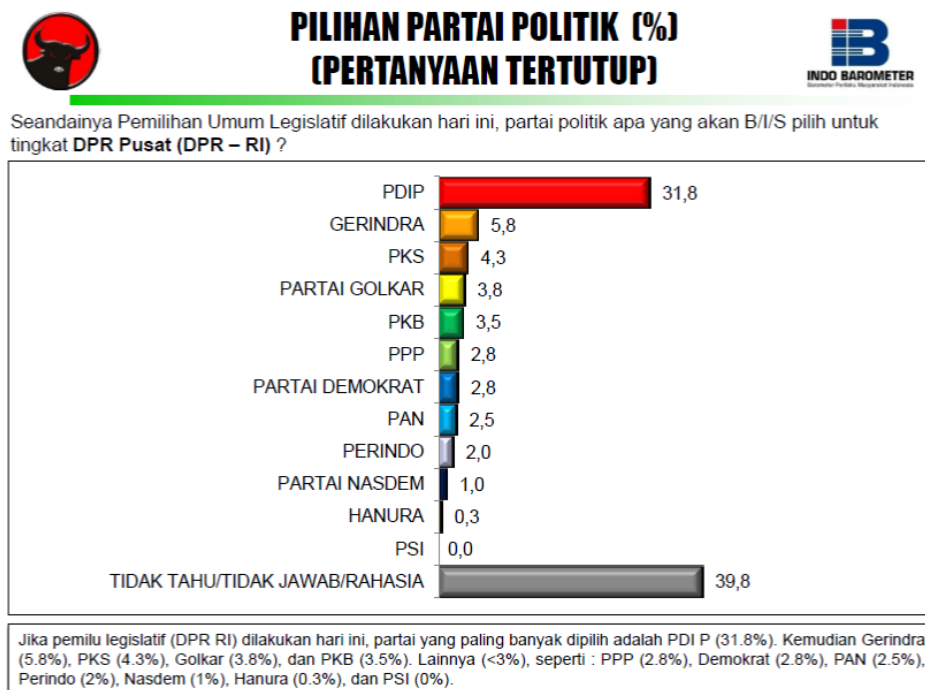
Sumber: Hasil survei olahan peneliti

Pemanfaatan Struktur Partai dan Basis Massa PDI Perjuangan

Jawa Tengah ialah “kandang banteng”, rasanya tidak ada yang menolak pernyataan tersebut. Karena faktanya memang demikian, semenjak pemilu pertama pasca reformasi tahun 1999, PDI Perjuangan selalu menang di Jawa Tengah. Tidak hanya dalam pemilihan legislatif, namun juga setiap pemilihan Gubernur semenjak diadakan pemilihan langsung di tahun 2008. Hal ini harus disadari betul oleh segenap calon legislatif yang berasal dari PDI Perjuangan, karena sedikit banyak mereka akan diuntungkan dengan hal tersebut. Setidaknya, pandangan masyarakat yang mengatakan, “siapa pun anggota dewannya, yang penting dari PDI Perjuangan” masih menggema di seantero Jawa Tengah.

Hal tersebut makin dikuatkan oleh hasil survei Indo Barometer di Dapil Jawa Tengah I pada bulan Januari silam terkait elektabilitas partai politik sebagai berikut.

Gambar 16: Grafik Hasil Survey Elektabilitas Partai Politik di Dapil Jawa Tengah I bulan Januari 2018, oleh Indo Barometer.



Keadaan seperti ini dibuktikan Juliari P Batubara, seorang anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ketika membuat sebuah acara, tidak menjadi sebuah kesulitan dalam mengumpulkan massa di luar struktur PDI Perjuangan. Karena masyarakatnya sendiri sebagian besar merupakan simpatisan partai, sehingga apabila ada acara yang berkaitan dengan partai entah siapa pun anggota dewannya, mereka pasti dengan senang hati mengahdirinya. Lama-kelamaan, dapat menimbulkan simpati masyarakat kepada anggota dewan yang bersangkutan.

Mendompleng Kader Partai Lainnya

Strategi mendompleng kader partai lainnya dapat diterapkan seorang anggota DPR RI atau caleg, ketika terdapat kader-kader yang dianggap memiliki reputasi baik di mata masyarakat. Pendomplengan kader tersebut bisa ke atas maupun ke bawah. Keatas seperti menyertakan gambar pejabat eksekutif dari partai yang sama di setiap atribut kampanye dan kebawah seperti bekerja sama dengan caleg di bawahnya, atau biasa disebut caleg tandem.

Mendompleng Joko Widodo, terlepas dari pro-kontra keberhasilannya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam memimpin negeri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan April 2018, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK berada di angka 72,2%. Sebuah angka yang lumayan bagus dalam capaiannya selama hampir empat tahu menjabat.

Selain mendompleng kader dengan kapasitas nasional seperti bapak Jokowi Widodo, pendomplengan secara ke bawah juga digunakan Juliari P Batubara untuk menjaga suara konstituen. Terlebih ketika menghadapi pemilihan legislatif atau diebut dengan caleg tandem. Karena berdasarkan fakta real di lapangan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam mencari suara ialah caleg tingkat Kabupaten/Kota. Caleg DPR RI terlalu besar jangkauannya apabila harus detail mendatangi kelompok masyarakat di bawah.

Pendekatan Komunitas

Selain melakukan kampanye dan sosialisasi yang sifatnya langsung kepada masyarakat, Juliari P Batubara juga menggunakan metode pendekatan komunitas di masyarakat Daerah Pemilihan Jawa Tengah I. Mendekati komunitas-komunitas dengan kepentingan tertentu agar mendukung Juliari P Batubara pada Pileg tahun 2014 dan tetap menjaga silaturahmi dengan tujuan menjaga suara konstituen sampai saat ini. Metode ini juga dinilai efektif karena apabila berhasil mendekati pimpinan organisasi ataupun komunitasnya, maka seluruh anggotanya akan serempak mengikuti apa kata pimpinan.

Selain melalui program kerja, pendekatan yang dilakukan terhadap komunitas juga dengan menggunakan perjanjian “kontrak politik”.Maksudnya adalah Juliari P Batubara siap melakukan kontrak politik dan melaksanakan apa yang ada dalam kontrak tersebut apabila terpilih menjadi Anggota DPR RI. Tentu saja isi dari kontrak politik tersebut berisi tentang memperjuangkan kepentingan komunitas yang melakukan kontrak politik.

Sosial Media

Kemajuan teknologi tidak dapat kita sangkal lagi di kehidupan saat ini, sehingga tidak ada pilihan untuk menolaknya melainkan beradaptasi dengannya. Begitu pula dengan atribut kampanye yang dapat dilakukan tidak hanya menggunakan media-media

dan cara-cara konvensional melainkan memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satunya ialah menggunakan sosial media.

Dewasa ini, masyarakat Indonesia hampir tidak ada yang tidak menggunakan smartphone. Sebagian pengguna smartphone, tentu juga menggunakan sosial media. Diantaranya Facebook, Twitter dan Instagram. Jadi untuk saat ini, sosialisasi kampanye politik tidak hanya dilakukan melalui darat (konvensional), tetapi juga melalui udara (sosial media). Manfaat yang diperoleh semua praktisi politik, tentu dengan memperhatikan etika-etika yang ada dan tidak membawa isu yang menimbulkan perpecahan.

Pembentukan Relawan

Strategi menjaga suara konstituen oleh Juliari P Batubara yang selanjutnya ialah dengan melibatkan masyarakat. Membentuk para relawan yang tergabung dalam sebuah kelompok, diantaranya Komunitas Juara, Koperasi Juara, Relawan Juara, dan Laskar Juara. Maksud dari Juara disini bukan hanya berarti pemenang, tetapi juga merupakan akronim dari Juliari P Batubara.

Tujuan dari pembentukan kelompok-kelompok tersebut ialah untuk mewedahi masyarakat-masyarakat yang simpati terhadap seorang Juliari P Batubara. Pembentukan-pembentukan kelompok yang berbeda-beda tersebut dilakukan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Disamping itu, beberapa relawan saat ini juga memegang akun sosial media Juliari P Batubara. Guna mensosialisasikan kegiatan-kegiatan, dan program kerja yang dilakukan oleh Juliari P Batubara.

Penutup

Juliari P. Batubara menengarai keberhasilannya menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I pada Pileg tahun 2014, bahkan mendapat suara terbanyak dengan 128.956 suara. Ialah dikarenakan dirinya banyak mengumpulkan simpul-simpul masa yang ada di Dapil Jawa Tengah I, yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Secara teoritis, Juliari P Batubara mengikuti perencanaan strategi politik oleh Peter Schroder dan analisis SWOT oleh Alfan Alfian, sebelum membuat beberapa strategi dalam upaya menjaga suara konstituen di daerah pemilihannya.

Strategi yang dianggap sebagai strategi paling efektif dalam menjaga suara konstituen, ialah dengan melakukan dialog tatap muka. Dari ketiga pihak anggota DPR RI yang dijadikan sampel penelitian, mulai dari Juliari P Batubara, Agus Hermanto, dan Yayuk Basuki. Ketiganya mengamini bahwa dialog tatap muka ialah strategi atau cara paling efektif dalam menjaga suara konstituen. Pun demikian dengan masyarakat pemilih, melalui hasil survei yang dilakukan peneliti. Dialog tatap muka menempati urutan teratas, sebagai strategi yang dianggap paling ampuh dalam menjaga suara konstituen. Namun walaupun dialog tatap muka dianggap sebagai strategi atau cara paling efektif bagi

anggota DPR RI, dalam menjaga suara konstituennya. Terdapat sebuah ambivalensi terhadap hasil jangkauan wilayah ataupun masyarakat yang telah dikunjungi.

Saran yang bisa diberikan, dialog tatap muka dianggap oleh politisi maupun masyarakat, sebagai strategi paling ampuh dalam menjaga suara konstituen anggota DPR RI. Namun tidak memiliki jangkauan yang luas, mengingat keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki seorang anggota dewan. Sehingga peneliti menyarankan kepada anggota DPR RI untuk membuat “Rumah Aspirasi” di daerah pemilihannya, yang memudahkan masyarakat atau konstituennya mudah dalam menyampaikan aspirasi, walaupun tidak bertemu dengan anggota DPR RI yang bersangkutan.

Selain itu, memanfaatkan kemajuan teknologi. Juga sangat disarankan kepada masing-masing anggota DPR RI untuk membuat website pribadi. Didalamnya terdapat menu pilihan “kotak aspirasi online”. Sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara online, di website pribadi tersebut. Tidak hanya anggota DPR RI, DPR RI secara institusi juga hendaknya mengadakan menu “kotak aspirasi online”. Melihat tidak semua anggota dewan sering turun ke daerah pemilihan, dan walaupun sering, belum dapat menjangkau seluruh wilayah daerah pemilihan. Karena selama ini di situs www.dpr.go.id belum terdapat fitur tersebut. Anggota DPR RI agar bekerja lebih maksimal dan saran tersebut terbuka untuk seluruh anggota dewan, baik dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota.

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, terlebih mengenai penjagaan suara konstituen anggota DPR RI maupun yang terkait. Sehingga diharap penelitian-penelitian selanjutnya dapat saling melengkapi, demi terciptanya kemajuan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik. Berdasarkan temuan terhadap faktor-faktor yang dibahas dalam penelitian kali ini. Kiranya penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai efektifitas *money politics* di Indonesia. Se jauh pengamatan penulis, strategi-strategi yang telah dibuat oleh anggota DPR RI bersama timnya dalam rangka menjaga suara konstituen akan efektif sejauh tidak ada kendala di lapangan, seperti *money politics*.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada para informan yang berkenan penulis wawancarai untuk kepentingan penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun

Catatan

- 1) Survei dilakukan di seluruh propinsi di Indonesia pada 8 – 18 Februari 2009 dengan total sampel sebanyak 2455 yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei. Margin of error +/- 2,4% dan tingkat kepercayaan 95%.
- 2) Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di 45 Dapil (Jawa, Sumut, Sulsel) pada bulan April 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden di tiap Dapil yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei. Responden dipilih secara random dengan prosedur multistage random sampling.

Daftar Pustaka

- Alfian, A. (2008). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asfar, M. (2006). *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004 Election in Indonesian*. Jakarta: Pustaka Eureka.
- Baali, Fuad, & Wardi, A. (1989). *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Borgatti, S. P., & Foster., P. C. (2003). Paradigma Jaringan Dalam Riset Organisasional: Sebuah Telaah dan Tipologi. *Journal of Management*, 991–1031.
- Lembaga Survey Indonesia. (2009). *Efek Calon terhadap Perolehan Suara Partai Menjelang Pemilu 2009*. Retrieved from http://www.lsi.or.id/file_download/65
- Lijphart, A. (1984). *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. New Haven, CT and London: Yale University Press.
- Maksum, A. (2008). *Pengantar Filsafat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, L. (2002). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudde, C. (2000). *The Ideology of Extreme Right*. Manchester: Manchester University Press.
- Noer, D. (1997). *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: PT. Mizan.
- Prasetya, I. G. N. A., Noak, P. A., & Erviantono, T. (2016). Strategi Pemenangan Calon Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Melalui Jaringan Cekian di Bali. *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/22196>
- Riduwan. (2005). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Rohaniah, Y. (2015). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Schroder, P. (2009). *Strategi Politik*. Jakarta: FNS.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulardi. (2012). *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensil Murni*. Malang: Setara Press.
- Surbakti, R. (1999). Formal political institutions. *Indonesia: The Challenge of Change*. Singapore: ISEAS.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Tittle*. Surakarta: Surakarta.
- Suwardi, Harsono, & Dkk. (2002). *Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Malang: Galang Press.

Tentang Penulis

Angga Arrasyid Dian Purnama adalah alumnus Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, saat ini menjadi staf ahli DPR RI, dan memiliki minat kajian pada studi kepartaian dan kepemiluan.